

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Mahkamah Agung. *Laporan Tahunan Tahun 2024*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2024.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Wantu, Fence M. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2014.
- Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. Jurnal

- Manan, Bagir. "Peradilan Administrasi Negara dan Peradilan Hak Warga." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 6, No. 12, 1999.
- Nuradanta, Emilka, dan Febby M. Nelson. "Penerapan Asas *Audi et Alteram Partem* dalam Perkara Permohonan Izin Poligami." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 7, No. 6, 2022. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.V7I6.8034>.

Sutrisno, A. "Peran Hakim dalam Mewujudkan *Due Process of Law* Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 1, 2025. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434>

C. Skripsi / Tugas Akhir

Dewi, Rury Mutia. *Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa atas Pemecatan yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi di Desa Sukaramai, Kabupaten Batu Bara)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021.

Firnanda, Dela. *Analisis Yuridis Putusan PTUN No. 151/G/2022/PTUN.SBY terkait Pembatalan Keputusan Kepala Desa Paiton (Pemberhentian Perangkat Desa) Ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2024.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

E. Website / Sumber Daring

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. *Putusan Nomor 123/G/2019/PTUN.BDG*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Diakses 26 November 2025.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. *Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BL*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Diakses 26 November 2025.